ARTIKEL

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PARE

Oleh:

ISTIANA

14.1.02.02.02224

Dibimbing oleh :

1. **Drs. Ec. Sugeng., Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA., A-CPA**
2. **Amin Tohari M.Si**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Istiana
NPM	: 14.1.02.01.0224
Telepun/HP	: 085645619836
Alamat Surel (Email)	: Istiana207@.com
Judul Artikel	: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telp : (0354) 771576, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 30 Juli 2018
Pembimbing I Drs. Ec. Sugeng., Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA., A-CPA NIDN.0708037605	Pembimbing II Amin Tohari, M.Si. NIDN.0720108202	Penulis, Istiana NPM 14.1.02.01.0224

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PARE

Istiana
14.1.02.01.0261
Ekonomi - Akuntansi
Istiana@gmail.com
Drs. Ec. Sugeng., Ak., MM., M.Ak., CA., ACPA., A-CPA dan Amin Tohari, M.Si
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak yang masih rendah. Terutama dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh MOdernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode expost facto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuisioner yang dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling ditujukan pada wajib pajak orang pribadi sebagai sampel yang berada dalam lingkup populasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Sedangkan untuk pengujian data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan asumsi klasik menggunakan SPSS for windows v.23. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KATA KUNCI : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan kas negara, di mana pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Sehubungan dengan itu perkembangan mengenai perpajakan terus berlangsung hingga sekarang ini disamping itu terus dilakukan perubahan-perubahan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Direktorat Jendral Pajak (DIP) selalu berusaha melakukan reformasi berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung tinggi asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satunya adalah dengan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara yang disebut dengan *Self Assessment System* (Waluyo, 2011).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010:140).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara tentangga, Malaysia yang sudah diatas 13 persen, Vietnam sudah sampai 16 persen,

dan Singapura juga sudah sampai 16 persen (www.pajak.go.id).

Tinggi-rendahnya anggapan wajib pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi di kantor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparatur perlu menjaga integritas dan nama baik instansi mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftar sebagai wajib pajak tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak Fasmi (2012). Selain modernisasi administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus, penerimaan kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi (Mintje, 2016).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, 2004)

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku (Rahmany, 2013). Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar (Setiawan, 2009).

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Kepatuhan wajib pajak bisa pula dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Kesadaran masyarakat baru nampak di hari-hari terakhir batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT), hal itu tetap menunjukkan adanya kemajuan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, terlihat masyarakat berduyun-duyun untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak (Susanto, 2009).

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Mengenai pelayanan kantor pajak yang dianggap mengecewakan dan terdapat ketidakpuasan dalam masyarakat, seperti atas hal-hal yang mengecewakan di bidang penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Beberapa hal mengenai keluhan masyarakat tersebut diwujudkan dengan penolakan atas pemenuhan atas kewajiban masyarakat atas pajak, dengan menempuh berbagai upaya (Ritonga, 2010).

Penelitian Candra, dkk (2013) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi fasilitas layanan dengan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian Sarunan (2015) menyatakan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penelitian Hardiningsih (2011) kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian Murti dkk bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rajif dan Zulaikha (2012).

Pemaparan diatas menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian antara Candra dkk (2013) dan Sarunan (2015) mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Tabel 1

Data Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Yang Melapor Surat Pemberitahuan (SPT)
1	2014	164.273	85.039
2	2015	184.117	76.979
3	2016	205.334	88.273
4	2017	220.407	80.415

Sumber : Data diolah tahun 2018

Kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang. Ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dapat dilihat dari penerimaan SPT pada tabel 1 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Berdasarkan data tersebut, maka penulis mengambil judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare"**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pare.

II. METODE

A Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas
   a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

      Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini (Nasucha, 2004).

   b. Kesadaran Perpajakan

      Kesadaran pajak adalah suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.

   c. Pelayanan Fiskus

      Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

2. Variabel Terikat

   Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib pajak. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010: 32)

B Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Expost Facto yang disebut juga sebagai penelltian kausal komparatif dengan objek analisis yang diteliti.

C Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare jalan Hassanudin No.16, Dandangan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai pada bulan Maret sampai Juni 2018.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare pada tahun 2017 yang berjumlah 220.407 wajib pajak orang pribadi.

2. Sampel

Dalam hal ini, penelitian menggunakan *Simple Random Sampling* sebagai teknik penentuan sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare.

E. Instrumen Penelitian

1. Validitas

Kriteria penilaian uji validitas adalah:

a) Apabila r hitung > r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
b) Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

Tabel 2

Hasil Uji Validitas

Validitas	Nomer Item	r hitung	r table	Ket
Kepatuhan wajib pajak	1	0,652	0,361	Valid
	2	0,629	0,361	Valid
	3	0,629	0,361	Valid
	4	0,664	0,361	Valid
	5	0,593	0,361	Valid
	6	0,650	0,361	Valid
	7	0,558	0,361	Valid
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	1	0,727	0,361	Valid
	2	0,640	0,361	Valid
	3	0,610	0,361	Valid
	4	0,621	0,361	Valid
	5	0,615	0,361	Valid
	6	0,638	0,361	Valid
Kesadaran Perpajakan	1	0,739	0,361	Valid
	2	0,624	0,361	Valid
	3	0,667	0,361	Valid
	4	0,605	0,361	Valid
	5	0,642	0,361	Valid
	6	0,614	0,361	Valid
Pelayanan fiskus	1	0,739	0,361	Valid
	2	0,624	0,361	Valid
	3	0,667	0,361	Valid
	4	0,605	0,361	Valid
	5	0,642	0,361	Valid
	6	0,614	0,361	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2018

2. Realibilitas

Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah:

a) Apabila hasil koefisien Alpha > tarif signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel.

b) Apabila hasil koefisien Alpha < tarif signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel.

Tabel 3

Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	N item	Nilai r alpha table	Nilai r alpha hitung	Keterangan
1	Kepatuhan wajib pajak	7	0,6	0,742	Reliabel
2	Modernisasi sistem administrasi perpajakan	6	0,6	0,687	Reliabel
3	Kesadaran wajib pajak	6	0,6	0,714	Reliabel
4	Pelayanan fiskus	6	0,6	0,747	Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

   Sumber data penelitian ini adalah menggunakan data primer.

2. Langkah-Langkah Pengumpulan Data
   a. Penelitian lapangan (observasi)
   b. Kuesioner
   c. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer *SPSS version 23 for Windows*

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

1) Analisis Grafik

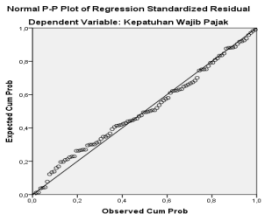

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Gambar 1: Grafik *Normal Probability Plot*

Berdasarkan hasil uji *normal probabiliy plot* diketahui bahwa data yang dianalisis berdistribusi normal, gambar yang ditunjukan telah memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukan pola distribusi normal. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Tabel 4

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Tes*

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,59001712
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,044
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Berdasarkan hasil dari tabel 1 di atas, bahwa data

residual terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai *Test Statistic* sebesar 0,072 dan nilai signifikansi pada 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residualnya terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,600	1,666
	Kesadaran Perpajakan	,602	1,662
	Pelayanan Fiskus	,612	1,634

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Nilai *Tolerance* keempat variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas / tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

c) Uji Heteroskedastisitas

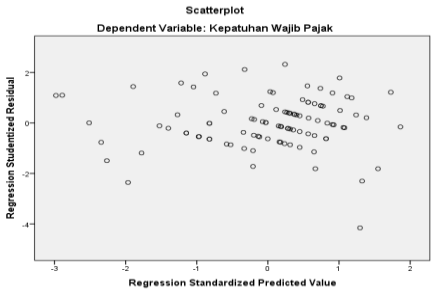

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Gambar 2: *Scatterplot*

Terlihat dari gambar 4.3 bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 disumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homogen.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

	Durbin-Watson
1	1,945

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Dilihat dari tabel *Durbin-Watson* nilai du adalah sebesar 1,736 karena banyak variabel bebas dari penelitian ini adalah sebanyak tiga variabel dan jumlah data sebanyak 100.

Dari tabel uji autokorelasi tersebut diketahui bahwa nilai dw sebesar 1,945 dan nilai 4-du sebesar 2,242. Dengan demikian 1,736 < 1,945 < 2,242, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sudah bebas dari autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	15,274	2,129
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,216	,099
Kesadaran Perpajakan	,195	,088
Pelayanan Fiskus	,162	,066

Sumber : Output SPSS versi 23 data diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini didapatkan model fungsi regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,274 + 0,216\ X_1 + 0,195\ X_2 + 0,162\ X_3$$

Persamaan regresi linier berganda pada tabel 7 menunjukkan interprestasi sebagai berikut :

a. a = 15,274; artinya apabila variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali (=0) maka Kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif sebesar 15,274.
b. b_1 = 0,216; artinya apabila Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus bernilai konstan atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,216.
c. b_2 = 0,195; artinya apabila Kesadaran Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus bernilai konstan atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,195.
d. b_3 = 0,162; artinya jika Pelayanan Fiskus mengalami kenaikan sebesar satu satuan sedangkan sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan bernilai konstan atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,162.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 8

Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,603[a]	,363	,343

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Adjusted R Square sebesar 0,343, menunjukan besarnya variasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Paajak adalah sebesar 34,3%. Berarti masih ada variabel lain sebesar 65,7% yang dapat menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1) Nilai signifikansi < 0,05 = H0 ditolak, artinya variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Nilai signifikansi ≥ 0,05 = H0 diterima, artinya variabel-variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji t (Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,274	2,129		7,174	,000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,216	,099	,230	2,187	,031
	Kesadaran Perpajakan	,195	,088	,233	2,214	,029
	Pelayanan Fiskus	,162	,066	,256	2,461	,016

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

1) Pengujian hipotesis 1

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebesar 0,031. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa signifikansi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan Modernisasi administrasi perpajakan, pelayanan prima disetiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak

menjadi salah satu yang utama untuk dilaksanakan, yang diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raniyah (2017). Hasil dari penelitian Raniyah (2017), menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

2) Pengujian hipotesis 2

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Kesadaran Perpajakan sebesar 0,029. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa signifikansi Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tryana (2013 bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sehingga kesadaran perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

3) Pengujian hipotesis 3

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Pelayanan Fiskus sebesar 0,016. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti bahwa signifikansi Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Uji F (Simultan)

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Nilai signifikansi < 0,05 = H0 ditolak, artinya variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Nilai signifikansi ≥ 0,05 = H0 diterima, artinya variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142,703	3	47,568	18,245	,000[b]
	Residual	250,287	96	2,607		
	Total	392,990	99			

Sumber: Output SPSS versi 23 data diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hal ini mendukung teori bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di atas maka implikasi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare. Dimana dari

hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang dituangkan dalam bentuk karya tulis, serta hasil penelitian ini dapat mendukung teori yang sudah ada yang digunakan peneliti lain sebagai landasan penelitian selanjutnya.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare maupun Ditjen Pajak dalam upaya meningkatkan sistem administrasi yang berbasis teknologi modern, menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, dimana dalam penelitian ini membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan pelayanan fiskus sendisri berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu: 1) penelitian ini hanya menggunakan varibel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus saja dalam analisis faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2) Penelitian ini hanya mengambil populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pare tahun 2017 saja.

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Direktorat Jendral Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan dan menggali lagi dengan memberikan sosialisai, pelatihan, pengarahan atau penjelasan tentang pengetahuan peraturan pajak agar masyarakat lebih memahami tentang perpajakan.
2) Program-program sosialisasi yang membahas tentang perpajakan lebih gencar dan aktif dalam pemasarannya agar dapat diterima oleh seluruh

lapisan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi wajib pajak.

3) Petugas pajak diharapkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak dengan bersikap ramah, adil, jujur, sehingga wajib pajak merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Susanto, A. 2009. Pajak Dibayar, Pelayanan Publik Wajib Ditingkatkan, tersedia: http://nasional.kompas.com, diakses: 30 Maret 2018.

Rahmany, F. 2013. tersedia: http://www.ortax.org, diakses: 29 Maret 2018.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi, Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak *The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. Jurnal* ISSN : 1979-4878, tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11075/10665, diunduh: 30 Maret 2018.

Jatmiko, N.A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis* Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, tersedia: http://eprints.undip.ac.id/15261/, diunduh: 26 Maret 2018.

Muliari dan Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, tersedia: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641/1855, diunduh: 30 Maret 2018.

Nasucha. 2004. *Pengaruh Reformasi Administrasi perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurmantu, S. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Rahayu, S K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, A. (2010). *AdministrasiPerpajakan.* Bandung: Nuansa.

Raniyah dan Titik M. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal* ISSN : 2460-0585, tersedia: https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/3570, diunduh: 3 April 2018.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Triwigati, L. 2013. *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan*. Universitas Brawijaya, Malang.

Sari, V.A.P. dan Fidiana. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal* ISSN: 2460-0585, tersedia: https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/2846/2463, diunduh: 3 April 2018.

Sarunan, W.K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, *Jurnal* ISSN 2330-1174, tersedia: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11075/10665, diunduh: 30 Marert 2018.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia,Edisi Kesepuluh.* Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id